

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marlina Makmur
Nim : 201730080
Fakultas Parodi : Akuntansi
Judul Karya Ilmiah : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Serapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palopo)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan karya ilmiah ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun *programming* yang tercantum sebagai bagian dari karya ilmiah ini. Jika terdapat karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ilmiah ini ataupun sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palopo.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palopo, 15 Oktober 2021



Marlina Makmur

201730080

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Yasonna H. Laoly, 2019). Dimana penyerapan anggaran termasuk indikator dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan suatu daerah. Hal ini dikarenakan melalui tingkat penyerapan anggaran, dapat diketahui gambaran mengenai kinerja/kemampuan daerah dalam melaksanakan dan mempertanggung jawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan (Mardiasmo, 2009).

Penyerapan anggaran yang baik dapat dilihat dari tingkat pelaksanaan realisasi fisik dan realisasi anggaran yang terjadwal sesuai dengan rencana kerja selama satu periode tahun anggaran (Oktaliza et al., 2020). Namun hampir semua daerah di Indonesia mengalami tingkat penyerapan anggaran yang rendah, dan fenomena ini terus hingga saat ini terjadi setiap tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani (2020) kembali menyoroti kinerja serapan anggaran pemerintah daerah yang lambat. Dari total belanja APBD yang sebesar Rp 1.080,7 triliun, hingga akhir tahun oktober

baru terealisasi Rp 678 triliun. Sehingga masih ada lebih dari Rp 400 triliun sendiri yang akan dieksekusi pada bulan November dan Desember. Fenomena rendahnya tingkat serapan anggaran ini terjadi di Kota Palopo. Bappeda mencatat, untuk Triwulan ketiga di 2020 ini, seluruh OPD di Kota Palopo baru mencapai angka rata-rata 55,87 persen atau Rp440.009.726.837. total APBD Palopo sendiri, untuk belanja langsung dan tidak langsung dari alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar Rp787.607.109.864.

Dari permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran organisasi perangkat daerah di pemerintah kota palopo. Menurut (Rahmawati & Ishak, 2020) faktor yang mempengaruhi serapan anggaran yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, sumber daya manusia, dan pengadaan barang dan jasa. Menurut (Gagola et al., 2017) faktor yang mempengaruhi serapan anggaran adalah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen, dan lingkungan birokrasi.

Hasil penelitian (Oktaliza et al., 2020) perencanaan anggaran menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses penyerapan anggaran karena perencanaan anggaran memberikan kontribusi besar terhadap penyerapan anggaran, begitupun dengan komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Semakin baik komitmen manajemen, maka akan semakin baik pula tingkat penyerapan anggarannya. Menurut (Elim et al., 2018) pelaksanaan anggaran

merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, dan proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien akan mempermudah proses penyerapan anggaran.

Untuk mencapai suatu kegiatan, semakin optimal penyerapan anggaran maka akan semakin banyak fasilitas umum dan pelayanan publik yang dapat dinikmati masyarakat, oleh karena itu pemerintah daerah harus lebih berkonsentrasi pada kegiatan yang lebih produktif untuk menghindari pengangguran uang daerah. Dalam hal ini, peneliti menyoroti beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran, antara lain perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan komitmen manajemen. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini ingin mengetahui apakah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan komitmen manajemen berpengaruh terhadap serapan anggaran organisasi perangkat daerah di pemerintah kota palopo.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perencanaan anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran organisasi perangkat daerah ?
2. Bagaimana pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran organisasi perangkat daerah ?
3. Bagaimana pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap serapan anggaran organisasi perangkat daerah ?

4. Bagaimana komitmen manajemen berpengaruh terhadap serapan anggaran organisasi perangkat daerah ?

1.3 tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh perencanaan anggaran terhadap serapan anggaran organisasi perangkat daerah.
2. Untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap serapan anggaran organisasi perangkat daerah.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengadaan barang dan jasa terhadap serapan anggaran organisasi perangkat daerah.
4. Untuk menganalisis pengaruh komitmen manajemen terhadap serapan anggaran organisasi perangkat daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman untuk :

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran organisasi perangkat daerah. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dengan baik bagi peneliti yang selanjutnya relevan dalam bidang ini.

1.4.2 Manfaat praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan sebagai pengetahuan tentang dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran organisasi perangkat daerah.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penyerapan adalah pengeluaran keuangan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah dalam rangka mendukung tugas dan fungsi satuan kerja. Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat, penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi serapan anggaran yaitu faktor perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, lingkungan birokrasi, komitmen manajemen, pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia, dan regulasi. Karena keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, maka pada penelitian ini penulis meneliti hanya faktor perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan komitmen manajemen yang mempengaruhi serapan anggaran organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kota Palopo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Stewardship Teory*

Menurut Donaldson et al (1991), teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidak termotivasi oleh kepentingan-kepentingan individu melainkan lebih fokus dengan tujuan organisasi. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Berdasarkan teori *stewardship*, prinsipal mengharapkan tanggung jawab bersama sesuai dengan kontribusi *steward*.

Dalam teori *stewardship*, terdapat suatu model yang didasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani, model ini disebut dengan *model of man*. Pada teori *stewardship* terdapat suatu pilihan antara perilaku *self serving* dan *pro-organisational*, perilaku pelayan tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi adalah bahwa perilaku eksekutif disejajarkan dengan kepentingan *principal* dimana para *steward* berada. *Steward* akan menggantikan atau mengalihkan *self serving* untuk berperilaku kooperatif (Anton, 2010).

Kesimpulannya, meskipun kepentingan antara *steward* dan *principal* berbeda, *steward* tetap akan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan.

Teori ini dapat dihubungkan dengan sektor publik karena pihak *steward* bertindak berdasarkan keinginan *Principal*. Maksudnya pihak pemerintah akan melakukan tugasnya sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan output yang maksimal ini akan memberikan tingkat kepuasan yang maksimal terhadap pihak *principal*. Dengan begitu *principal* akan menilai kinerja yang dilakukan oleh *Steward* sangat baik.

Implikasi *stewardship theory* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi organisasi perangkat daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggung jawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka manajemen (*stewards*) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

2.1.2 Serapan Anggaran

Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran yang telah

disusun akan dievaluasi pada akhir tahun untuk melihat apakah estimasi kinerja tersebut telah tercapai. Pencapaian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dalam bentuk kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan Bastian Indra (2006). Menurut Elim et al. (2018) anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Menurut Rahmawati & Ishak (2020) anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi.

PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan

Dimana salah satu indikator dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan suatu daerah adalah penyerapan anggaran. Hal ini dikarenakan melalui tingkat penyerapan anggaran, dapat diketahui gambaran mengenai kinerja/kemampuan daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang

telah direncanakan Mardiasmo (2009). Semakin optimal penyerapan anggaran untuk realisasi kegiatan, maka akan berdampak pada semakin banyak fasilitas umum dan pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam pemerintah daerah harus fokus pada kegiatan-kegiatan yang lebih produktif sehingga tidak menimbulkan uang daerah yang menganggur BPKP (2011).

Menurut Rahmawati & Ishak (2020) faktor yang mempengaruhi serapan anggaran yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, sumber daya manusia, dan pengadaan barang dan jasa. Menurut Gagola et al. (2017) faktor yang mempengaruhi serapan anggaran adalah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen, dan lingkungan birokrasi. Menurut penelitian Oktaliza et al. (2020) faktor yang mempengaruhi serapan anggaran adalah kualitas SDM (sumber daya manusia), regulasi, perencanaan anggaran, dan komitmen manajemen. Dan dari penelitian Elim et al. (2018) faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran, diantaranya perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen, dan lingkungan birokrasi. Berdasarkan penelitian terdahulu menyoroti beberapa faktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi serapan anggaran yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, dan komitmen manajemen.

Menurut (Oktaliza et al., 2020) penyerapan anggaran yang baik dapat dilihat dari tingkat pelaksanaan realisasi fisik dan realisasi anggaran yang terjadwal sesuai dengan rencana kerja selama satu periode tahun anggaran. Menurut (Jumriani,

2018) Serapan anggaran dalam hal ini adalah kemampuan Pemda untuk merealisasikan sejumlah anggaran yang sudah ditetapkan bersama lembaga legislative (DPRD) didalam APBD yang dinyatakan dengan skala ordinal. Menurut Salwah (2019) penyerapan anggaran merupakan salah satu tolak ukur kinerja pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian. Dan menurut Ramdhani & Anisa (2017) penyerapan anggaran yang akuntabel dan memenuhi prinsip value of money merupakan salah satu penerapan praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadi ukuran kinerja pemerintah. Berdasarkan beberapa pendapat dari penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa serapan anggaran adalah suatu kemampuan pemerintah dalam menjalankan rencana kerja dan mampu melakukan dan mempertanggungjawabkannya.

2.1.3 Perencanaan Anggaran

Secara umum, pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan (*Planning*) dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurung waktu tertentu. Dalam UU No. 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dan perencanaan yang diatur dalam undang-undang no.25 tahun 2004 yaitu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mencakup landasan

hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Untuk merealisasikan perencanaan dibutuhkan anggaran.

Beberapa pengertian perencanaan menurut para ahli berikut ini: Menurut Garth N.Jone, perencanaan adalah suatu proses pemilihan dan pengembangan dari pada tindakan yang paling baik untuk pencapaian tugas. Menurut M.Farland, perencanaan adalah suatu fungsi dimana pimpinan kemungkinan menggunakan sebagian pengaruhnya untuk mengubah daripada wewenangnya. Menurut Abdulrachman (1973), perencanaan adalah pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta dan atau perkiraan yang mendekat (*estimate*) sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan-tindakan kemudian. Menurut Siagian (1994), perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan.

Menurut Terry (1975), perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Menurut Kusmiadi (1995),

perencanaan adalah proses dasar yang kita gunakan untuk memilih tujuan-tujuan dan menguraikan bagaimana cara pencapaiannya. Menurut Soekartawi (2000), perencanaan adalah pemilihan alternatif atau pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia. Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan yaitu sebuah pemikiran yang dihasilkan lalu dikumpulkan untuk bisa merancang sebuah proses secara matang untuk mencapai target atau tujuan yang diinginkan kedepannya.

2.1.4 Pelaksanaan Anggaran

Dalam pemberian materi oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Praptomo Widodo (2018) mengatakan pelaksanaan anggaran adalah tahap dimana sumber daya manusia digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi bahwa anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat. Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap anggaran yang berwenang dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung melihat masalah pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran yang baik adalah pelaksanaan yang tepat waktu, efektif dan efisien. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah antara lain: kepatuhan terhadap regulasi, kesesuaian atas perencanaan dan penganggaran, efisiensi pelaksanaan kegiatan, serta efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Menurut Gagola et al. (2017) pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Dan proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan-persoalan dalam internal satuan kerja, serta proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Kedua hal tersebut mempengaruhi besar kecilnya penyerapan anggaran. Menurut Salwah (2019) pelaksanaan anggaran merupakan tahapan kegiatan yang dibuat oleh masing-masing pelaksanaan anggaran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan kegiatan, maka dengan dilaksanakannya pelaksanaan anggaran berarti bahwa program dan rencana operasional tahunan yang dapat dianggarkan akan mulai dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai aturan. Dalam penelitian Ramdhani & Anisa (2017) pelaksanaan anggaran merupakan upaya-upaya untuk merealisasikan perencanaan anggaran yang telah dibuat. Pelaksanaan anggaran merupakan aktivitas yang dilaksanakan, yang terkait dengan penggunaan anggaran. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran yaitu proses selanjutnya yang akan dilakukan setelah menetapkan perencanaan anggaran dengan aturan yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakannya suatu program kegiatan. Dan dalam PP 71 Tahun 2010 penyusunan dan penyajian laporan pelaksanaan anggaran harus mengikuti prinsip-prinsip standar akuntansi pemerintah (SAP) dimana menerapkan berbasis akrual. Laporan keuangan yang baik adalah yang disusun berdasarkan SAP.

2.1.5 Pengadaan Barang/Jasa

secara umum pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Pengadaan barang/jasa terbagi dua yaitu pengadaan barang/jasa pada sektor pemerintah dan non pemerintah. Pada sektor pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang/jasa berlangsung cukup sulit. Proses yang berlangsung harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan tidak boleh melanggar peraturan sedikitpun. Menurut Keppres No.54, 2010 definisi pengadaan barang dan jasa adalah merupakan suatu kegiatan pengadaan dalam hal untuk mendapatkan barang dan jasa.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sistem Pengadaana Secara Elektronik (SPSE) merupakan aplikasi *e-Procurement* yang dikembangkan oleh

Direktorat Pengembangan SPSE-LKPP untuk digunakan oleh layanan pengadaan secara elektronik di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Menurut Mulyono (2016) dengan adanya *e-procurement* peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin rendah, sehingga proses pengadaan dapat berlangsung lebih transparan, hemat waktu dan biaya serta mudah dalam pertanggungjawaban keuangannya. Secara umum, alur proses aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Nasional, yaitu:

1. Persiapan lelang

Dalam persiapan lelang, terdapat kegiatan pembentukan ULP/Pejabat Pengadaan, pembuatan lelang, dan pengumuman lelang kepada rekanan melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional. Persiapan lelang melibatkan admin agency, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

2. Metode pemilihan, seleksi, dan evaluasi penyedia barang/jasa secara elektronik pada dasarnya sama dengan metode pelaksanaan lelang nonelektronik yang diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah namun pelaksanaannya dilakukan secara elektronik.

3. Metode penyampaian dokumen dapat dilakukan dengan cara:

1. Metode e-lelang pascakualifikasi dengan satu file

2. Metode e-lelang pascakualifikasi dengan dua file
3. Metode e-lelang prakualifikasi dengan satu file
4. Metode e-lelang prakualifikasi dengan dua file.

2.1.6 Komitmen Manajemen

Komitmen organisasi merupakan tingkat sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu Yanuariza et al. (2019). Apabila setiap pegawai memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan prestasi terbaik baik masyarakat, maka tentunya kinerja sektor publik akan meningkat Mahmudi dalam Yanuariza et al. (2019).

Pengertian komitmen manajemen/organisasi menurut para ahli yaitu: Menurut O'Reilly 1989 komitmen manajemen adalah sebagai ikatan kejiwaan seseorang terhadap organisasi yang mencakup keterlibatan kerja, kesetiaan dan perasaan percaya terhadap nilai-nilai organisasi. Menurut Mathins dan Jackshon (2000) pengertian komitmen organisasi adalah derajat dimana karyawan mempercayai dan menerima tujuan-tujuan organisasi serta tidak akan meninggalkan organisasi tersebut. Pengertian komitmen organisasi menurut Luthans 2006 adalah keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi dan keyakinan tertentu juga penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Menurut Allen dan Meyer pengertian komitmen organisasi adalah kelekatan emosi, identifikasi dan keterlibatan individu

dengan organisasi serta keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Berdasarkan dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komitmen manajemen/organisasi merupakan keterikatan kuat antara anggota organisasi dengan organisasi tersebut yang secara sukarela dalam mengikuti setiap kegiatan organisasi dan memiliki keinginan yang kuat dalam berusaha untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Allen dan Meyer dalam Oktavianti (2017) mengemukakan tiga komponen tentang komitmen organisasi:

1. *Affective Commitment*, terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional (emotional attachment) atau merasa mempunyai nilai sama dengan organisasi.
2. *Continuance Commitment*, yaitu kemauan individu untuk tetap bertahan dalam organisasi karena tidak menemukan pekerjaan lain atau karena rewards ekonomi tertentu.
3. *Normative Commitment*, timbul dari nilai-nilai karyawan. Karyawan bertahan menjadi anggota organisasi karena ada kesadaran bahwa berkomitmen terhadap organisasi merupakan hal yang memang seharusnya dilakukan.

2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Peneliti	Variabel Peneliti	Hasil Peneliti
Ahmad Rifai, Biana Adha Inapty, Rr. Sri Pancawati M (2016)	Analisis Faktor- Faktor Yang Memengaruhi Keterlambatan Daya Serap Anggaran (Studi Empiris Pada SKPD Pemprov NTB)	X_1 = Perencanaan, X_2 = Regulasi, X_3 = Pelaksanaan, X_4 = Desentralisasi, X_5 = SDM X_6 = Koordinasi Y = Keterlambatan Daya Serap Anggaran	Perencanaan, regulasi, pelaksanaan, desentralisasi, SDM dan koordinasi tidak berpengaruh terhadap keterlambatan daya serap anggaran

Tabel Lanjutan

Nama Peneliti	Judul Peneliti	Variabel Peneliti	Hasil Peneliti
Ledy S. Gagola, Jullie J. Sondakh, Jessy D.L. Warongan (2017)	Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud	X_1 = perencanaan anggaran X_2 = pelaksanaan anggaran X_3 = pengadaan barang dan jasa X_4 = komitmen manajemen X_5 = lingkungan birokrasi Y = Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)	Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen, lingkungan berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah
Meyulinda Aviana Elim, Deasy Susana Ndaparoka, Thobias Elianus David Tomasowa (2018)	Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Kupang	X_1 = perencanaan anggaran X_2 = pelaksanaan anggaran X_3 = pengadaan barang dan jasa X_4 = komitmen manajemen X_5 = lingkungan birokrasi Y = penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen, lingkungan berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah
Yola Oktaliza, Muhammad Ahyaruddin, Annie Mustika	Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan	X_1 = kualitas SDM X_2 = regulasi X_3 = perencanaan anggaran	Kualitas SDM, regulasi, perencanaan anggaran dan

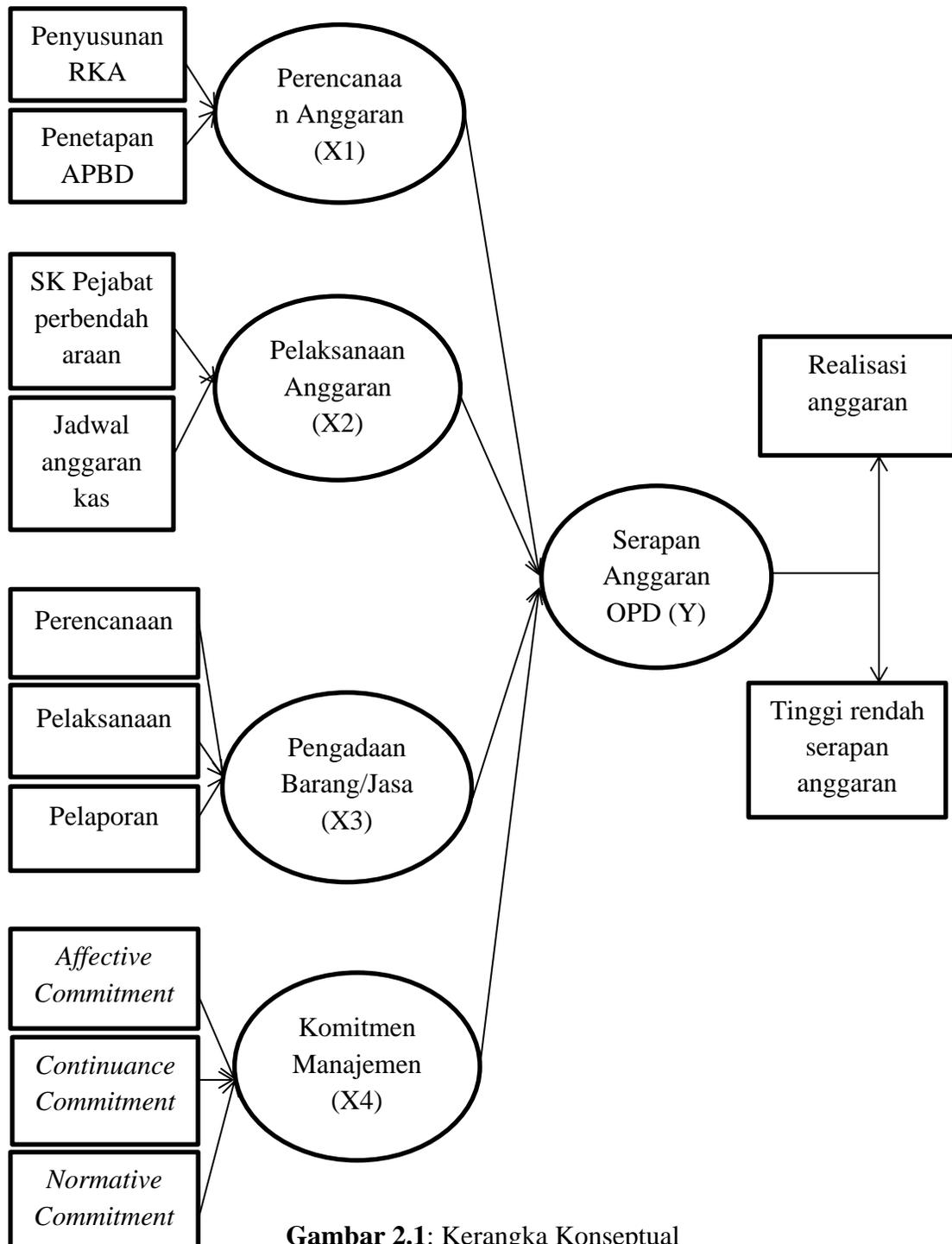
Tabel Lanjutan

Nama Peneliti	Judul Peneliti	Variabel Peneliti	Hasil Peneliti
Putri (2020)	Anggaran Belanja Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau	X_4 = komitmen manajemen Y = penyerapan anggaran belanja	komitmen manajemen berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja

Sumber: Jurnal Penelitian

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti, dimana hal ini membantu peneliti peneliti menguraikan secara sistematis permasalahan dalam penelitian. Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut:



2.4 Hipotesis

Hipotesis atau tanggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ini masih dugaan sementara di penelitian ini. Adapun hipotesis penelitian ini adalah:

1. Diduga perencanaan anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran organisasi perangkat daerah.
2. Diduga pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran organisasi perangkat daerah.
3. Diduga pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap serapan anggaran organisasi perangkat daerah.
4. Diduga komitmen manajemen berpengaruh terhadap serapan anggaran organisasi perangkat daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal. Dimana pendekatan kausal ini adalah penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat dengan cara berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada, mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa, dan Komitmen Manajemen sebagai variabel independen terhadap Serapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sebagai variabel dependen di Pemerintah Kota Palopo melalui penyebaran kuesioner.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah pada Organisasi Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), dan Dinas Sosial pada Pemerintah Kota Palopo. Dipilihnya lokasi penelitian ini karena berkaitan dengan subjek penelitian yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah, dengan waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama dua bulan.

3.3 Populasi Dan Sampel

Menurut Sugiyono dalam Yanuariza et al, (2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah 40 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Kota Palopo. Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang di ambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dari populasi dengan berdasarkan kriteria yaitu 1. Bidang keuangan, 2. Pengambil keputusan, 3. Pengambil kebijakan. Jumlah organisasi perangkat daerah yang ada di Kota Palopo yang menjadi sampel sebanyak 3 OPD dengan responden sebanyak 57 pegawai.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Data tersebut berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden dan akan langsung di respon secara tertulis yang bekerja di organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan menjadi sampel penelitian yang ada di Pemerintah Kota Palopo. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapatkan peneliti secara langsung dari

melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kota Palopo. Data sekunder yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran (LRA) dari sampel yang akan diteliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung oleh peneliti kepada responden dan dijawab langsung atas kuesioner yang diberikan kepada OPD Kota Palopo dan pengambilan data langsung berupa laporan realisasi anggaran yang menjadi sampel di BPKAD dan di tunggu selama dua minggu.

3.6 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional

3.6.1 variabel penelitian

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini yaitu variabel bebas (independen) dimana variabel yang mempengaruhi variabel lainnya, dan variabel terikat (dependen) yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan komitmen manajemen, dan variabel terikatnya adalah serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Palopo.

3.6.2 Definisi Operasional

Definisi operasional dari masing-masing variabel akan dijelaskan sebagai berikut:

1. variabel independen (X)

Adapaun variabel independen (X) dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran organisasi perangkat daerah: (1) perencanaan anggaran, yaitu suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (2) pelaksanaan anggaran, adalah tahap dimana sumber daya manusia digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran (3) pengadaan barang dan jasa, merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa (4) komitmen manajemen, adalah karyawan menerima tujuan organisasi dan menerima serta kesedian bekerja keras demi tercapai sebuah tujuan organisasi tersebut.

2. variabel dependen (Y)

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini yaitu serapan anggaran organisasi perangkat daerah di pemerintah Kota Palopo. Serapan anggaran adalah selisih antara jumlah anggaran yang ditetapkan dengan anggaran yang terealisasi menunjukkan besarnya varian anggaran (*budget vatiances*). Semakin kecil varian anggaran, maka semakin besar serapan anggaran dan menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan.

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner/angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menunjukkan pertanyaan kemudian di jawab oleh responden secara tertulis untuk memperoleh informasi dimana pada pengukurannya menggunakan skala likert. Data mengenai serangkaian pertanyaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kota Palopo.

Skala pengukuran untuk mengukur variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Pertanyaan dalam skala likert akan diisi oleh responden dalam jumlah kategori tertentu, sebagai berikut.

1. Sangat Setuju diberi skor 5
2. Setuju diberi skor 4
3. Kurang setuju diberi skor 3
4. Tidak Setuju diberi skor 2
5. Sangat Tidak Setuju diberi skor 1

Instrumen penelitian yang lainnya yaitu setiap pertanyaan mengandung indikator sesuai dengan variabel yang digunakan. Instrumen penelitian harus memiliki pertanyaan yang valid dan reliabel.

3.8 Analisis Data

3.8.1 Uji Kualitas Data

3.8.1.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner, suatu koesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan yang ada pada koesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan di ukur oleh kuesioner tersebut. Di dalam penelitian ini pengujian validitas akan dilakukan dengan menggunakan *Pearson correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang telah diperoleh dari sejumlah pertanyaan-pertanyaan, apabila Sig.(2-tailed) yang dapat memiliki nilai dibawah 0,05 artinya bahwa data yang telah diperoleh adalah valid (Ghozali, 2009).

3.8.1.2 Uji Reliabilitas

Dalam uji reliabilitas mampu menunjukkan konsistensi dari data-data yang telah dikumpulkan, suatu kuesioner dikatakan handal jika jawaban dari pertanyaan seseorang konsisten dan tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu (Ghozali, 2009), uji reliabilitas ini hanya akan dilakukan setelah suatu instrument telah dipastikan validitasnya. Cara mengukur reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja. Disini pengukuran yang dilakukan hanya sekali dan setelah itu hasilnya di bandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Kriteria dari pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengujian *Cronbach Alpha* $> 0,60$ Nunnaly, 1960 dalam (Ghozali, 2009).

3.8.2 Metode Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan yang menyoroiti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Adapun metode analisis regresi linear berganda dengan formulasi matematis sebagai berikut :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e$$

Y = serapan anggaran organisasi perangkat daerah

a = konstanta

b_1x_1 = koefisien regresi perencanaan anggaran

b_2x_2 = koefisien regresi pelaksanaan anggaran

b_3x_3 = koefisien regresi pengadaan barang dan jasa

b_4x_4 = koefisien regresi komitmen manajemen

e = error

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

3.8.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Menurut priyatno (2009) jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus dipenuhi yaitu data berasal dari distribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi

normal, seperti diketahui bahwa uji T dan uji F mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal Ghazali (2016). Adapun uji normalitas di dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas *one-sample Kolmogorov-Smirnov test* dengan bantuan SPSS. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordina, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak terdistribusi normal, atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal maka metode yang digunakan adalah statistik nonparametrik.

3.8.3.2 Uji Multikolenieritas

Uji asumsi klasik digunakan pada persamaan model regresi sehingga data-data yang digunakan dalam pengujian hipotesis bebas dari asumsi klasik. Uji multikolenieritas menurut Priyatno (2009) multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas yaitu adanya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi (model persamaan regresi). Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen Ghazali Imam (2016). Untuk nilai *cutoff* yang digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah *variance inflation factor* (VIF) $> 0,1$.

Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinieritas. Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan diantaranya:

1. dengan melihat nilai *inflation faktor* (VIF) pada model regresi,
2. dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r^2) dengan nilai determinasi secara serentak (R^2),
3. dengan melihat nilai *eigenvalue* dan *condition index*.

Tetapi dalam penulisan kali ini akan dilakukan uji multikolinieritas dengan melihat nilai *inflation faktor* (VIF) pada model regresi. Adapun uji multikolinieritas di dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS.

3.8.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.

3.8.4 Uji Hipotesis

3.8.4.1 Uji T

Uji t (uji parsial) pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dan signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi secara parsial dilakukan dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Untuk menentukan nilai t tabel ditentukan dengan tingkat signifikan 5%. Kriteria pengujian yang digunakan, yaitu : $p\text{-value} < 0,05$, maka H_a ditolak.

3.8.4.2 Uji F

Uji F (uji simultan) pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan nilai F tabel, tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5%. Kriteria pengujian yang digunakan, yaitu: jika $p\text{-value} > 0,05$, maka H_a ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo

a. Sejarah singkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo

Pada awal dibentuknya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomot 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya. Setelah adanya Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD).

**b. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kota Palopo**

1) Visi

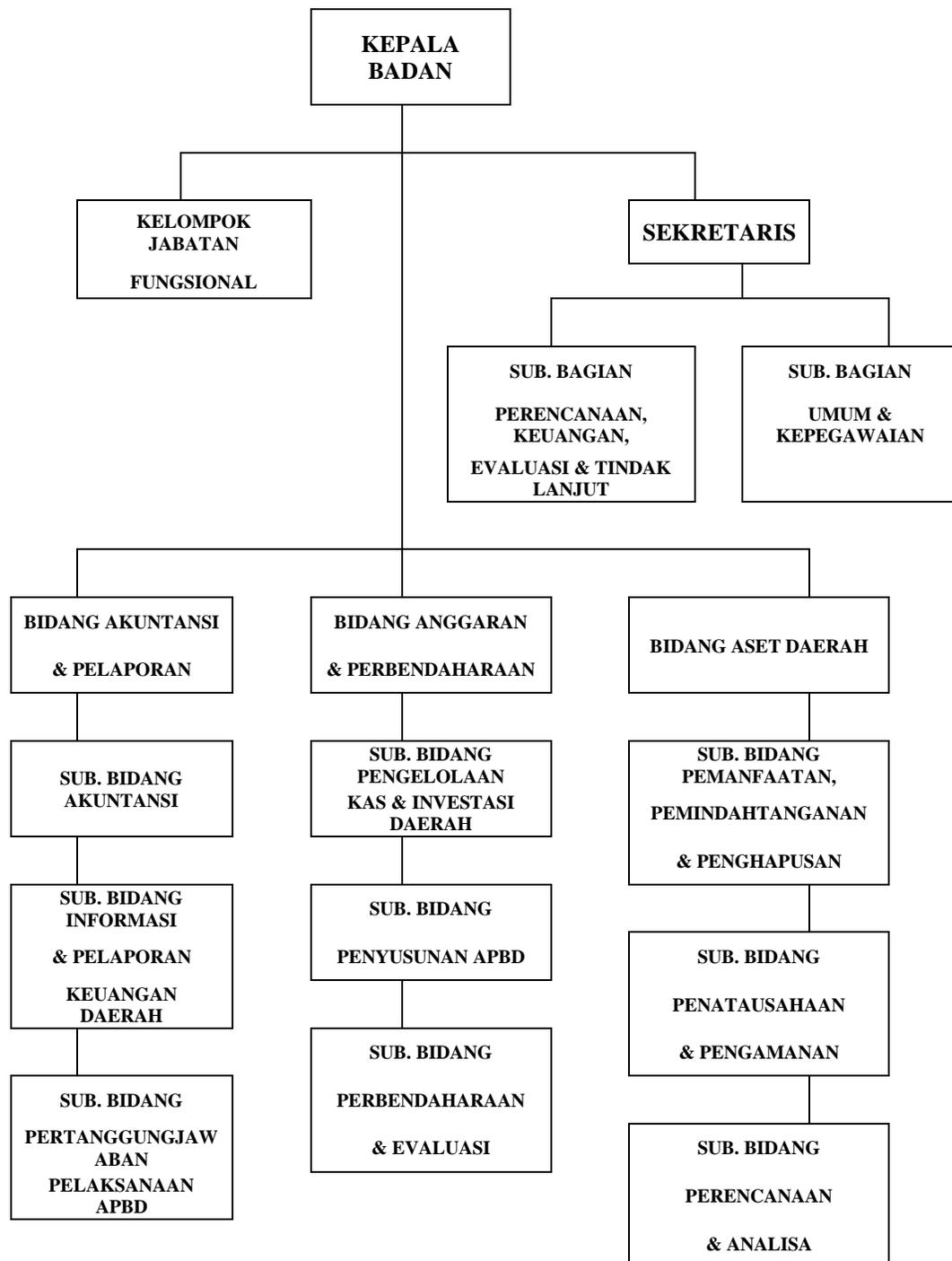
“Terwujudnya Palopo sebagai Kota Pendidikan, Jasa, Niaga, dan Agroindustri yang Berwawasan Agama, Budaya, dan Lingkungan yang Terkemuka di Indonesia.”

2) Misi

- a) Meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya manusia (SDM) aparat pelaksana pengelola keuangan dan aset daerah
- b) Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah
- c) Meningkatkan profesionalisme pelayanan pengelolaan keuangan dan manajemen aset daerah.

c. Struktur Organisasi BPKAD Kota Palopo

Struktur organisasi merupakan hal yang penting dalam perusahaan yang menggambarkan hubungan wewenang antara atasan dan bawahan. Masing-masing fungsi memiliki wewenang dan tanggungjawab yang melekat sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya agar tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui efisiensi dan efektivitas kerja. Struktur organisasi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi BPKAD

4.1.2 Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palopo

a. Sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota

Palopo

Pada awalnya fungsi pengelolaan pendapatan daerah dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2008. Dimulai pada tahun 2016 fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah dan fungsi pendapatan daerah dipisahkan masing-masing, dimana fungsi pengelolaan keuangan dan aset dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sedangkan fungsi pendapatan daerah dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 58 Tahun 2016.

b. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palopo

1) Visi

“ Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan pada Tahun 2023”.

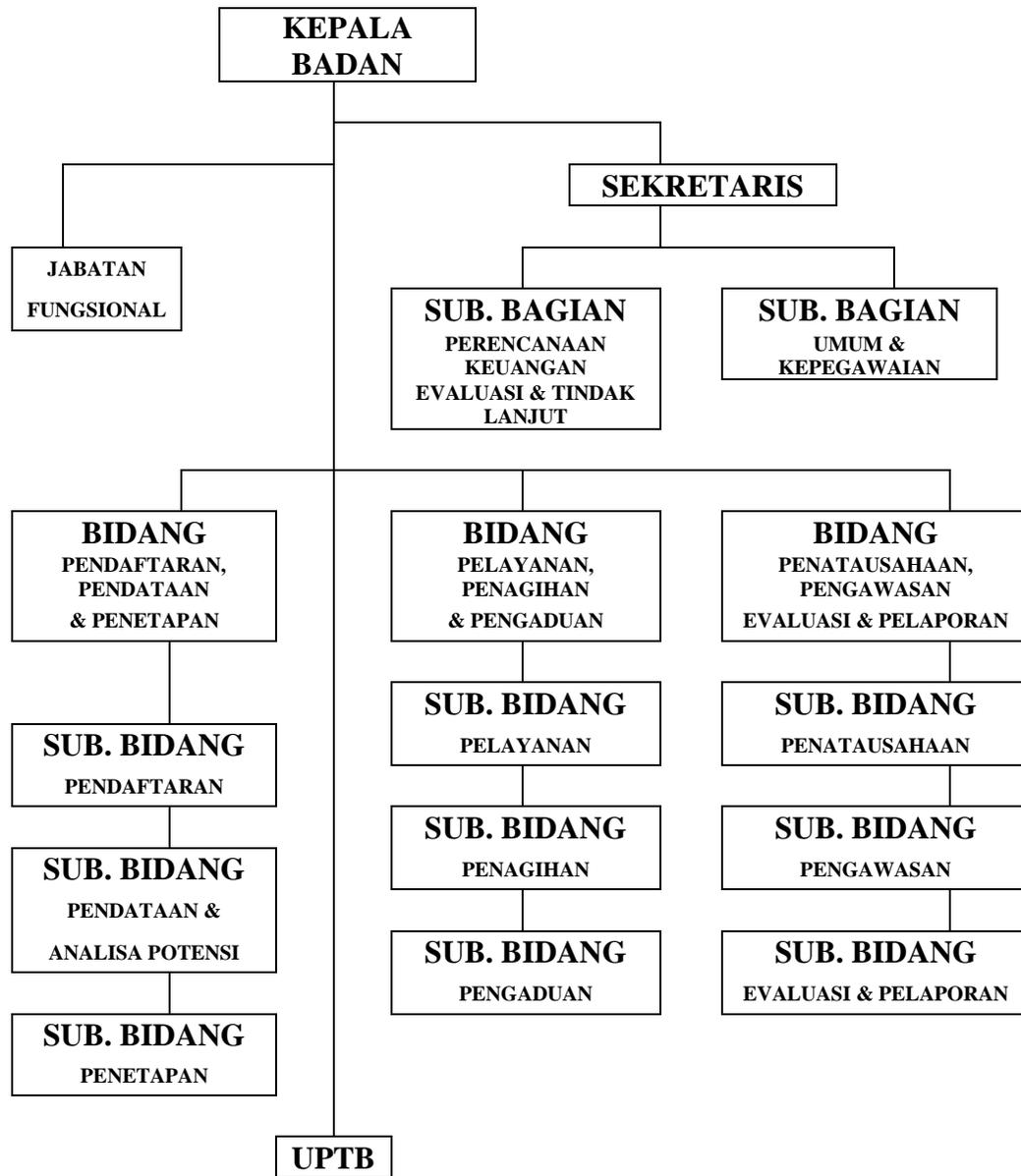
2) Misi

- a) Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan,
- b) Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan terbuka hijau,

- c) Memodernisasi layanan publik. Meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan,
- d) Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis,
- e) Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi yang bercirikan nilai budaya Luwu.

c. Struktur Organisasi BAPENDA Kota Palopo

Struktur organisasi merupakan hal yang penting dalam perusahaan yang menggambarkan hubungan wewenang antara atasan dan bawahan. Masing-masing fungsi memiliki wewenang dan tanggungjawab yang melekat sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya agar tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui efisiensi dan efektivitas kerja. Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4.2
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

4.1.3 Dinas Sosial Kota Palopo

a. Sejarah singkat Dinas Sosial Kota Palopo

Pada awalnya Dinas Sosial dikenal dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 02 Desember 2016 dan berubah menjadi Dinas Sosial pada Tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palopo, Dinas Sosial telah memiliki tugas dan fungsinya. Dan menyusun organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial sebagaimana tercantum dalam No. 36 Tahun 2016.

b. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Palopo

1) Visi

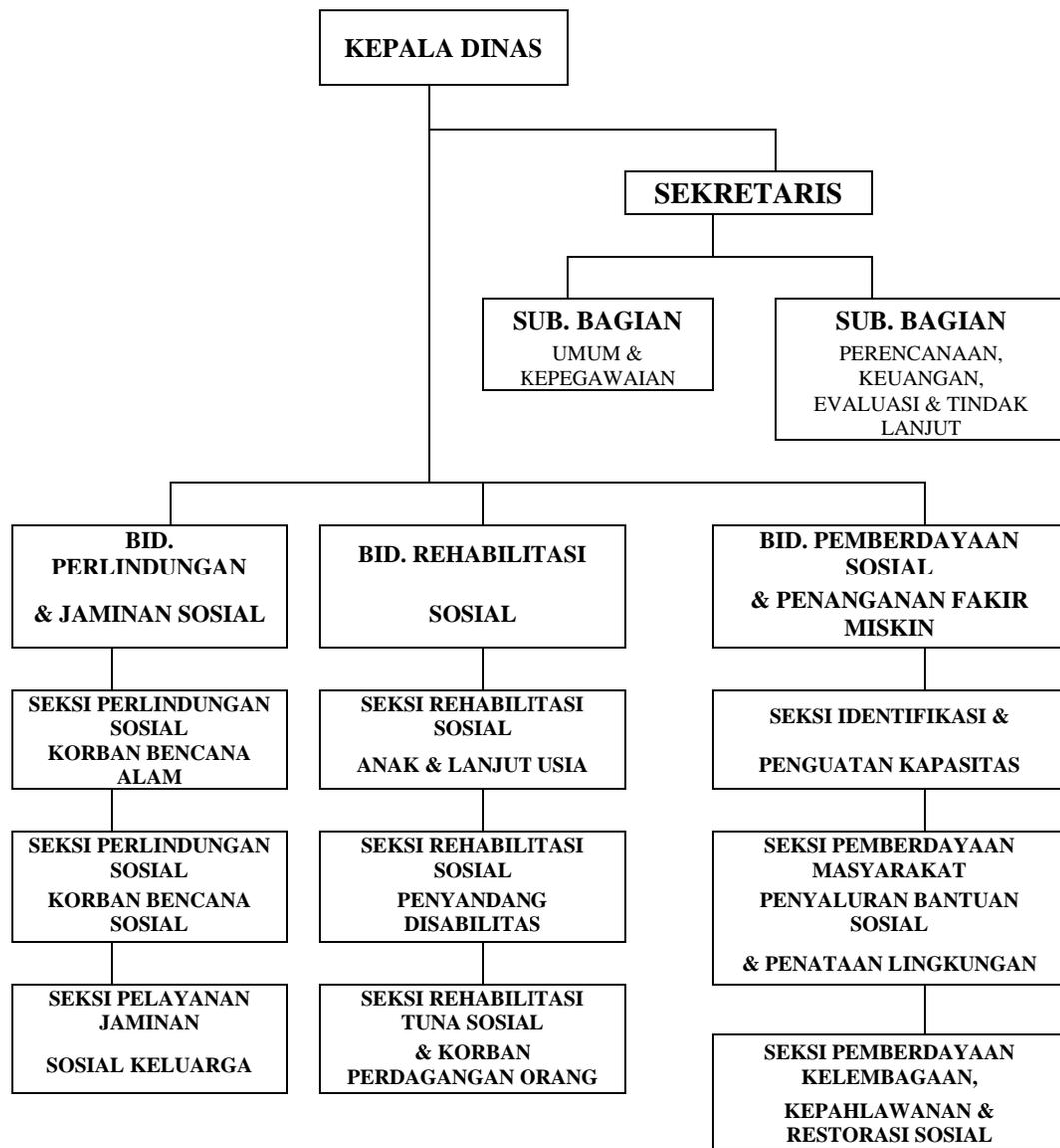
“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Yang Berkualitas, Mandiri dan Bermartabat”

2) Misi

- a) Meningkatkan aksesibilitas layanan perlindungan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),
- b) Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan dan wawasan kebangsaan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial serta meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana.

c. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palopo

Adapun struktur organisasi Dinas Sosial dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4.3
Struktur Organisasi Dinas Sosial

4.2 Deskripsi Data

Responden di penelitian ini merupakan pegawai negeri dalam bidang keuangan yang bekerja di Dinas Pemerintahan Kota Palopo yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), dan Dinas Sosial. Dimana peneliti mendapatkan data dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan ke seluruh pegawai negeri bidang keuangan pada dinas tersebut sebanyak 62 kuesioner dengan jumlah kuesioner yang dikembalikan dan diisi sebanyak 57 kuesioner atau sebesar 92%.

Adapun rincian dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 4.1
Jumlah Responden

No	Keterangan	Jumlah kuesioner	Persentase (%)
1	Distribusi kuesioner	62	100%
2	Kuesioner kembali	57	92%
3	Kuesioner cacat/tidak kembali	5	8%
4	Kuesioner yang dapat diolah	57	92%
n = sampel yang kembali			
Responden rate = $\frac{57}{62} \times 100\%$			
= 92%			

Sumber: data primer diolah (2021)

Tabel 4.2
Jenis kelamin Responden

No	Jenis kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	24	43%
2	Perempuan	33	57%
	Jumlah	57	100%

Sumber: Data primer diolah, 2021

Pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 57 responden dalam

penelitian ini, terdapat responden laki-laki sebanyak 24 orang, dan responden perempuan sebanyak 33 orang. Artinya, responden dalam penelitian ini didominasi oleh perempuan.

Tabel 4.3
Usia Responden

Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah Responden (orang)	Presentase (%)
22 – 28	10	17%
29 – 35	21	37%
36 – 48	26	46%
Jumlah	57	100%

Sumber: Data primer diolah, 2021

Pada data dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 57 responden dalam penelitian ini, terdapat responden dengan kelompok umur mulai dari 22 – 28 tahun sebanyak 10 responden, kelompok umur 29 – 35 tahun sebanyak 21 responden, dan kelompok 36 – 48 tahun sebanyak 26 responden. Dalam penelitian ini, kelompok umur yang dikatakan produktif telah menjawab pertanyaan maupun pernyataan dalam kuesioner ini, yaitu dengan usia yang berkisar antara 22 tahun sampai 48 tahun, yaitu usia sebelum memasuki masa pensiun. Responden dapat menjawab isi dari kuesioner dengan tepat yang telah di bagikan.

Tabel 4.4
Pendidikan Responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Presentase
1	S1	37	65%
2	S2	20	35%
	Jumlah	57	100%

Sumber: Data primer diolah, 2021

Pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 57 responden dalam penelitian ini, terdapat pendidikan terakhir responden dengan kelompok pendidikan terakhir S2 sebanyak 20 responden dan kelompok pendidikan terakhir S1 sebanyak 37 Responden. Dalam penelitian ini, kelompok pendidikan terakhir yang dikatakan produktif telah menjawab pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner ini, yaitu dengan pendidikan terakhir S1 sampai S2 dapat menjawab dengan tepat isi dari kuesioner yang telah dibagikan.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Uji Kualitas Data

4.3.1.1 Uji Validitas

Dalam penelitian ini, untuk mengukur validitas suatu data dilaksanakan dengan menggunakan bantuan dari program SPSS versi 25. Kriteria yang digunakan untuk mengukur validitas data adalah:

1. Apabila nilai *pearson correlation* r hitung $>$ r tabel , maka item kuesioner tersebut valid.
2. Sebaliknya, apabila r hitung $<$ r table, maka item tersebut dikatakan tidak valid.

Hasil r hitung dari 7 pernyataan (X1), 3 pernyataan (X2), 8 pernyataan (X3), 6 pernyataan (X4) dan 5 pernyataan (Y) sehingga dalam kuesioner penelitian pada variable independen yaitu Perencanaan Anggaran (X1), Pelaksanaan Anggaran (X2), Pengadaan Barang/Jasa (X3), Komitmen Manajemen (X4) dan variable dependen yaitu Serapan Anggaran. Variable tersebut dinyatakan valid apabila memiliki nilai r hitung $>$ r table. Sedangkan tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5 %. Hal tersebut

dapat dilihat pada penyajian validitas setiap variabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Perencanaan anggaran	X1.1	0,373	0,2201	Valid
	X1.2	0,491	0,2201	Valid
	X1.3	0,838	0,2201	Valid
	X1.4	0,867	0,2201	Valid
	X1.5	0,837	0,2201	Valid
	X1.6	0,801	0,2201	Valid
	X1.7	1	0,2201	Valid
Pelaksanaan anggaran	X2.1	0,926	0,2201	Valid
	X2.2	0,794	0,2201	Valid
	X2.3	1	0,2201	Valid
Pengadaan barang/jasa	X3.1	0,560	0,2201	Valid
	X3.2	0,372	0,2201	Valid
	X3.3	0,935	0,2201	Valid
	X3.4	0,376	0,2201	Valid
	X3.5	0,519	0,2201	Valid
	X3.6	0,652	0,2201	Valid
	X3.7	0,445	0,2201	Valid
	X3.8	0,465	0,2201	Valid
Komitmen manajemen	X4.1	0,616	0,2201	Valid
	X4.2	0,697	0,2201	Valid
	X4.3	0,378	0,2201	Valid
	X4.4	0,562	0,2201	Valid
	X4.5	0,862	0,2201	Valid
	X4.6	1	0,2201	Valid
Serapan anggaran	Y.1	0,631	0,2201	Valid
	Y.2	0,259	0,2201	Valid
	Y.3	0,259	0,2201	Valid
	Y.4	0,491	0,2201	Valid
	Y.5	1	0,2201	Valid

Sumber data: lampiran 1, diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan tentang perencanaan anggaran (X1), pelaksanaan anggaran (X2), pengadaan barang/jasa (X3),

komitmen manajemen (X4) dan serapan anggaran (Y) dinyatakan valid karena nilai *pearson correlation r* hitung > r tabel itu sendiri.

4.3.1.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari responden itu stabil dari waktu ke waktu. Nilai ketentuan untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistic *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk dapat dinyatakan reliabel jika *Cronbach Alpha* > 0,6.

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Alpha Cronbach's</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Perencanaan Anggaran (X1)	0,923	0,60	Reliabel
Pelaksanaan Anggaran (X2)	0,947	0,60	Reliabel
Pengadaan Barang/Jasa (X3)	0,691	0,60	Reliabel
Komitmen Manajemen (X4)	0.801	0,60	Reliabel
Serapan Anggaran (Y)	0,733	0,60	Reliabel

Sumber data: lampiran 2, diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hasil dari alpha cronbach's seluruh variabel menunjukkan > 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner penelitian dapat di percaya sebagai alat ukur dalam menjelaskan variabel Perencanaan Anggaran (X1), Pelaksanaan Anggaran (X2), Pengadaan Barang/Jasa (X3), Komitmen Manajemen (X4) Dan Serapan Anggaran (Y).

4.3.2 Analisa Data

4.3.2.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, dan komitmen manajemen terhadap variabel dependen yaitu serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah. Adapun hasil uji analisis regresi berganda disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3.420	1.540		2.220	.031		
Perencanaan anggaran	.718	.082	1.178	8.729	.000	.176	5.689
Pelaksanaan anggaran	-.700	.108	-.693	-6.498	.000	.282	3.552
Pengadaan barang/jasa	.183	.092	.233	1.994	.051	.234	4.277
Komitmen manajemen	-.080	.073	-.121	-1.091	.280	.259	3.858

a. Dependent Variable: Serapan anggaran

Sumber data: diolah di SPSS 2021

Dari tabel hasil analisis regresi berganda di atas, diperoleh koefisien variabel bebas perencanaan anggaran (X1) sebesar 0,718, koefisien variabel bebas pelaksanaan anggaran (X2) sebesar -0,700, koefisien variabel bebas pengadaan barang/jasa (X3) adalah sebesar 0,183 dan koefisien variabel bebas komitmen manajemen (X4) adalah sebesar -0,080. Oleh karena itu, persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = a + b_1X_1 - b_2X_2 + b_3X_3 - b_4X_4 + e$$

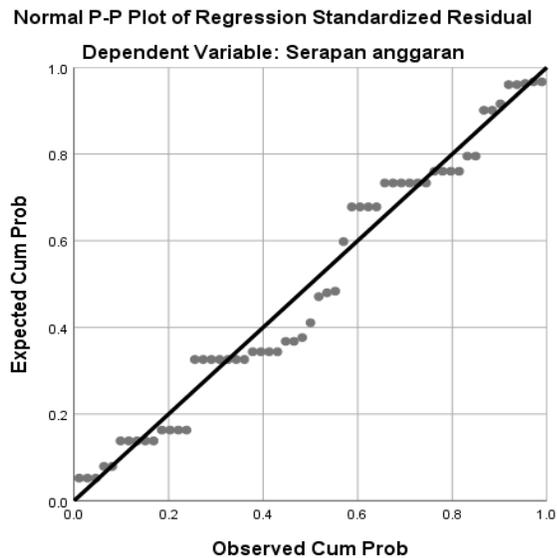
$$Y = 3,420 + 0,718 (X_1) - 0,700 (X_2) + 0,183 (X_3) - 0,080 (X_4) + e$$

- a. Nilai konstanta untuk persamaan regresi berdasarkan perhitungan statistik diatas sebesar 3,420 artinya apabila variabel bebas bernilai nol maka serapan anggaran OPD di Kota Palopo sebesar 3,420 satuan.
- b. Nilai koefisien (b_1) Sebesar 0,718 menunjukkan bahwa pengaruh perencanaan anggaran (X_1) terhadap serapan anggaran OPD (Y) adalah positif, artinya setiap peningkatan variabel perencanaan anggaran sebesar satu satuan maka serapan anggaran OPD di Kota Palopo akan mengalami kenaikan 0,718 satuan.
- c. Nilai koefisien (b_2) Sebesar -0,700 menunjukkan bahwa pengaruh pelaksanaan anggaran (X_2) terhadap serapan anggaran OPD (Y) adalah negatif, artinya setiap peningkatan variabel pelaksanaan anggaran sebesar satu satuan maka serapan anggaran OPD di Kota Palopo akan mengalami penurunan sebesar -0,700 satuan.
- d. Nilai koefisien (b_3) Sebesar 0,183 menunjukkan bahwa pengaruh pengadaan barang/jasa (X_3) terhadap serapan anggaran OPD (Y) adalah positif, artinya setiap peningkatan variabel pengadaan barang/jasa sebesar satu satuan maka tata kelola Pemerintahan Desa akan mengalami kenaikan sebesar 0,183 satuan.
- e. Nilai koefisien (b_4) Sebesar -0,080 menunjukkan bahwa pengaruh komitmen manajemen (X_4) terhadap serapan anggaran OPD (Y) adalah negatif, artinya setiap peningkatan variabel komitmen manajemen sebesar satu satuan maka tata kelola Pemerintahan Desa akan mengalami penurunan sebesar -0,080 satuan.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji untuk mengetahui jika data telah terdistribusi normal atau tidak dengan syarat dari uji normalitas itu sendiri yaitu model regresi harus terdistribusi normal. Dimana jika nilai signifikan $> 0,05$, maka nilai residual berdistribusi normal. Namun jika nilai signifikan $< 0,05$, maka nilai residual tidak berdistribusi normal.



Sumber data: diolah di SPSS (2021)

Gambar 4.4
Grafik Plot Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.4 di atas pada grafik plot menunjukkan titik-titik mengikuti garis diagonalnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Selain grafik dalam penelitian ini juga

menggunakan uji statistik Kolmogorov Smirnov, adapun hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		57	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.72059703	
Most Extreme Differences	Absolute	.119	
	Positive	.119	
	Negative	-.105	
Test Statistic		.119	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.042 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.373 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.360
		Upper Bound	.385
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			

Sumber data: diolah di SPSS (2021)

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov dengan pendekatan Monte Carlo menunjukkan nilai signifikan $0,373 > 0,05$, maka dapat disimpulkan data terdistribusi secara normal karena nilai p-value yang didapat lebih besar dari 0,05.

4.3.3.2 Uji Multikolonieritas

Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3.420	1.540		2.220	.031		
Perencanaan anggaran	.718	.082	1.178	8.729	.000	.176	5.689
Pelaksanaan anggaran	-.700	.108	-.693	-6.498	.000	.282	3.552
Pengadaan barang/jasa	.183	.092	.233	1.994	.051	.234	4.277
Komitmen manajemen	-.080	.073	-.121	-1.091	.280	.259	3.858

a. Dependent Variable: Serapan anggaran

Sumber data: diolah di SPSS 2021

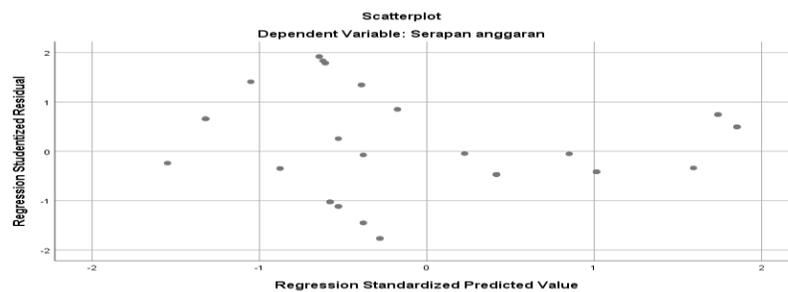
Berdasarkan hasil dari uji *multikolonieritas* yang dapat dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* yang diperoleh dari masing-masing variabel adalah $< 1,000$. Besar *tolerance* yang dimiliki oleh variabel tersebut adalah, variabel perencanaan anggaran sebesar 0,176, variabel pelaksanaan anggaran sebesar 0,282, variabel pengadaan barang/jasa sebesar 0,234 dan variabel komitmen manajemen sebesar 0,259. Sehingga, nilai tersebut dapat memenuhi syarat bahwa agar tidak terjadi korelasi antar variabel independen, maka nilai *tolerance* dari masing-masing variabel harus $< 1,000$.

Selain itu, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dalam penelitian ini adalah perencanaan anggaran sebesar 5.689, pelaksanaan anggaran sebesar 3.522, pengadaan barang/jasa sebesar 4.277 dan komitmen manajemen sebesar 3.858. Oleh karena itu, nilai tersebut juga telah memenuhi syarat lainnya dari uji multikolonieritas ini bahwa

nilai dari VIF harus $> 0,1$. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas antar variabel independen dalam penelitian ini.

4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilaksanakan untuk menguji apakah di dalam model regresi dalam penelitian terjadi ketidaksamaan variance residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain. Jika dalam *variance residual* dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut sebagai homoskedastisitas. Akan tetapi apabila dalam pengamatan yang satu ke pengamatan yang lainnya berbeda, maka disebut sebagai heteroskedastisitas. Penelitian yang baik adalah penelitian yang menggunakan model regresi yang baik, yaitu dengan menggunakan model regresi yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil pelaksanaan uji heteroskedastisitas:



Gambar 4.5
Hasil Uji Heterokedastisitas

Dari hasil uji yang telah dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memiliki heteroskedastisitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya

titik-titik yang tersebar secara acak pada sumbu Y dan diatas maupun dibawah angka 0.

4.3.4 Uji Hipotesis

4.3.3.1 Uji T

Uji t bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial (sendiri) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

- a. Jika nilai signifikan $< 0,05$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
- b. Jika nilai signifikan $> 0,05$ atau $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Tabel 4.10
Hasil Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	3.420	1.540		2.220	.031
	Perencanaan anggaran	.718	.082	1.178	8.729	.000
	Pelaksanaan anggaran	-.700	.108	-.693	-6.498	.000
	Pengadaan barang/jasa	.183	.092	.233	1.994	.051
	Komitmen manajemen	-.080	.073	-.121	-1.091	.280

a. Dependent Variable: Serapan anggaran

Sumber data: diolah di SPSS 2021

Dari hasil pengujian uji t di atas yang menggunakan program SPSS, dapat disimpulkan bahwa:

Pengujian hipotesis pertama (H1) : Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $8,729 > t \text{ tabel}$

1,672, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dimana variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y.

Pengujian hipotesis kedua (H2) : Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh variable X2 terhadap variabel Y adalah sebesar $0,000 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima dimana variabel X2 berpengaruh terhadap variabel Y.

Pengujian hipotesis ketiga (H3) : Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh variabel X3 terhadap variabel Y adalah sebesar $0,051 > 0,05$ dan nilai t hitung $1,994 > t$ tabel 1,672, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima dimana variabel X3 berpengaruh terhadap variabel Y.

Pengujian hipotesis keempat (H4) : Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh variabel X4 terhadap variabel Y adalah sebesar $0,280 > 0,05$ dan nilai t hitung $-1,091 < t$ tabel 1,672, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak dimana Variabel X4 tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

4.3.3.2 Uji F

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan (bersama-sama) yang diberikan variabel independen (X) kepada variabel dependen (Y) dengan tingkat signifikan 0,05. Berdasarkan nilai signifikansi (Sig) dari output Anova yaitu sebagai berikut:

- a. Jika nilai sig $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Artinya bahwa perencanaan anggaran (X1), pelaksanaan anggaran (X2) pengadaan barang/jasa (X3) dan komitmen manajemen (X4) secara simultan berpengaruh terhadap serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (Y).

- b. Jika nilai sig > 0,05, maka hipotesis ditolak. Artinya bahwa secara perencanaan anggaran (X1), pelaksanaan anggaran (X2) pengadaan barang/jasa (X3) dan komitmen manajemen (X4) secara simultan berpengaruh terhadap serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (Y).

Tabel 4.11
Hasil Uji F

ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	145.588	4	36.397	65.087	.000 ^b
	Residual	29.079	52	.559		
	Total	174.667	56			

a. Dependent Variable: Serapan anggaran

b. Predictors: (Constant), Komitmen manajemen, Perencanaan anggaran, Pelaksanaan anggaran, Pengadaan barang/jasa

Sumber data: diolah di SPSS 2021

Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikan untuk X1, X2, X3 dan X4 berpengaruh secara simultan terhadap Y yaitu sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $65.087 > 2,54$ (F tabel). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan diterima dimana terdapat pengaruh antara variabel X1, X2, X3 dan X4 terhadap variabel Y.

4.4 Laporan Realisasi Anggaran

4.4.1 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial

Tabel 4.12
Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial

Tahun	Dinas Sosial		
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Serapan anggaran
2016	5.158.340.300,00	5.168.791.717,00	100,20 %
2017	7.658.622.340,00	7.446.290.971,00	97,23 %
2018	7.125.383.522,00	7.035.333.178,00	98,74 %
2019	9.607.702.400,00	9.535.904.205,00	99,25 %
2020	5.830.302.298,00	5.738.176.988,00	99,82 %
Rata-rata	7.076.070.172,00	6.984.899.411,600	99,04 %

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial (2021)

Berdasarkan laporan realisasi anggaran Dinas Sosial yang didapatkan dari BPKAD Kota Palopo terlihat dalam lima tahun terakhir dari tahun 2016-2020, secara keseluruhan penyerapan anggaran telah terserap sebesar 99,04% hal ini berarti bahwa serapan anggaran pada Dinas Sosial telah baik dalam penyerapan anggaran karna hampir mencapai 100%. Di tahun 2016 tingkat serapan anggaran telah mencapai 100,20% hal ini berarti di tahun tersebut tingkat serapan anggaran tinggi, dan di tahun 2017-2020 terlihat bahwa tingkat serapan anggaran hampir mencapai dari 100% dan ini terlihat bahwa serapan anggaran telah terserap dengan baik karena hampir mendekati dari 100%. Serapan anggaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang/jasa dan komitmen manajemen. Variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan

barang/jasa dan komitmen manajemen dalam uji simultan atau di uji secara bersama-sama berpengaruh terhadap serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah. Namun dalam uji parsial variabel perencanaan anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran dimana nilai signifikannya sebesar 0,000 lebih besar dari 0,05 hal ini membuktikan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran, pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih besar dari 0,05 dan pengadaan barang/jasa yang berpengaruh terhadap serapan anggaran dimana nilai t sebesar 1.994 > dari t tabel sebesar 1.672, penelitian ini sejalan dengan penelitian Gagola et al., (2017), Elim et al. (2018), dan Ramdhani & Anisa, (2017) yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap serapan anggaran. Namun komitmen manajemen secara parsial tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran.

4.4.2 Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah

Tabel 4.13
Laporan Realisasi Anggaran BAPENDA

Tahun	Badan Pendapatan Daerah		
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Serapan Anggaran
2017	19.623.342.900,00	17.216.904.435,00	87,74 %
2018	20.947.436.663,00	18.412.113.329,00	87,90 %
2019	26.128.735.000,00	27.207.576.518,02	104,13 %
2020	26.168.679.970,00	27.575.840.022,00	104,20%
Rata-rata	23.217.048.633,00	22.603.108.576,02	95,99 %

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BAPENDA (2021)

Berdasarkan laporan realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah yang didapatkan dari BPKAD Kota Palopo terlihat dalam empat tahun terakhir dari tahun 2017-2020 secara keseluruhan penyerapan anggaran terserap sebesar 95,99%, hal ini berarti bahwa tingkat serapan anggaran pada Badan Pendapatan Daerah telah baik karena telah hampir mendekati dari 100%. Di tahun 2017 dan 2018 tingkat serapan anggaran masih rendah yang hanya terserap sebesar 87,74% dan 87,90% , tetapi di tahun 2019-2020 terlihat bahwa tingkat serapan anggaran tinggi. Hal ini ini membuktikan terjadi peningkatan serapan anggaran di badan pendapatan daerah di tahun 2019-2020.

Serapan anggaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang/jasa dan komitmen manajemen. Variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang/jasa dan komitmen manajemen dalam uji simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah. Namun secara parsial hanya perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa yang berpengaruh terhadap serapan anggaran, penelitian ini sejalan dengan penelitian Gagola et al., (2017), Elim et al. (2018), dan Ramdhani & Anisa, (2017) yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap serapan anggaran. Namun komitmen manajemen secara parsial tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran.

4.4.3 Laporan Realisasi Anggaran BPKAD

Tabel 4.14
Laporan Realisasi Anggaran BPKAD

Tahun	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah		
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Serapan anggaran
2016	932.533.109.306,00	883.230.853.889,27	94,71 %
2017	767.731.258.952,00	748.923.385.418,47	97,55 %
2018	801.033.760.283,00	782.162.444.145,29	97,64 %
2019	812.459.359.961,00	800.672.077.528,66	98,55 %
2020	769.513.792.565,00	771.959.387.471,98	100,02 %
Rata-rata	796.654.056.213,00	797.389.624.291,77	97,89 %

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPKAD (2021)

Berdasarkan laporan realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo terlihat dalam lima tahun terakhir dari tahun 2016-2020 dari nilai rata-rata penyerapan anggaran telah terserap sebesar 97,89%, hal ini berarti serapan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah tinggi dimana hampir mencapai 100%. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakannya. Dan tingkat serapan anggaran dari tahun 2016-2020 tingkat penyerapannya baik dari tahun ke tahun, dan membuktikan bahwa serapan anggaran terserap dengan baik dan meningkat setiap tahunnya sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan dalam penyerapan anggaran tersebut.

4.5 Pembahasan Penelitian

4.5.1 Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Serapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah

Dari hasil uji parsial variabel perencanaan anggaran (X1) berpengaruh signifikan terhadap serapan anggaran OPD (Y) di pemerintah Kota Palopo. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.8 menunjukkan nilai uji parsial sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa semakin baik perencanaan anggaran yang disusun maka akan menunjukkan tingkat penyerapan yang baik dan begitupun sebaliknya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Elim et al. (2018) yang berjudul Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Kupang, menunjukkan perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Dimana perencanaan anggaran memberi kontribusi besar terhadap penyerapan anggaran sehingga semakin baik perencanaan anggaran akan semakin baik penyerapan anggaran. Hal ini juga dapat dilihat dalam penelitian Oktaliza et al., (2020) dalam judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran menunjukkan nilai signifikan 0,017 lebih kecil dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Hal ini juga sejalan dengan teori *stewardship*, dimana pihak *principal* dan *steward* memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan organisasi demi mencapai kesuksesan organisasi. Masyarakat atau pemberi amanah (*principal*) memiliki hak dan kewenangan untuk meminta Dinas Sosial, BAPENDA dan BPKAD atau penerima amanah (*steward*) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya termasuk juga dalam hal ini pihak *principal* harus melaporkan perencanaan program yang telah mereka buat.

4.5.2 Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Serapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah

Dari hasil uji parsial variabel pelaksanaan anggaran (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap serapan anggaran OPD (Y) di pemerintah Kota Palopo. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.8 menunjukkan nilai uji parsial sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 dengan nilai t hitung 6,498 > dari t tabel 1,673. Hal ini menunjukkan bahwa H2 diterima, dan pelaksanaan anggaran akan dapat dilaksanakan dengan baik jika pelaksanaan anggaran dilakukan dengan baik dan akan menghasilkan penyerapan anggaran yang baik pula. Hal ini juga sejalan dalam perspektif teori *stewardship*, semakin baik pelaksanaan anggaran, maka penyerapan anggaran akan semakin baik. Hal ini akan mempengaruhi Organisasi Perangkat Daerah (*steward*) menjalankan tugas dan fungsinya yang sejalan dengan tujuan organisasi dan seperti yang diinginkan masyarakat (*principal*).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ramdhani & Anisa, (2017) yang berjudul Pengaruh Perencanaan Anggaran , Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, dimana hasil pengujian yang telah dilakukan secara parsial pada pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran menunjukkan bahwa hasil t hitung diperoleh 2,474 dan t tabel adalah 1,982 maka $2,474 > 1,982$ hipotesis alternatif (H_a) diterima dengan tingkat signifikansi $0,015 < 0,05$ artinya secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan pelaksanaan anggaran dengan eksternal terhadap penyerapan anggaran. Dalam penelitian Gagola et al., (2017) bahwa pelaksanaan anggaran juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap serapan anggaran. Namun penelitian ini tidak sejalan dalam penelitian Rahmawati & Ishak, (2020) dan Rifai et al., (2016) yang menyatakan pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, pada satuan kerja masih mengalami hambatan-hambatan.

4.5.3 Pengaruh Pengadaan Barang/Jasa terhadap Serapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah

Dari hasil uji parsial variabel pengadaan barang/jasa (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap serapan anggaran OPD (Y) di pemerintah Kota Palopo. Berdasarkan pada tabel 4.8 menunjukkan nilai uji parsial dengan nilai t hitung $1,994 >$ dari t tabel 1,673. Hal ini menunjukkan bahwa H_3 diterima, dan pengadaan barang/jasa akan dapat dilaksanakan dengan baik jika pelaksanaan anggaran dilakukan dengan baik dan akan menghasilkan penyerapan anggaran yang

baik pula. Proses pengadaan barang jasa yang efektif dan efisien akan mempermudah proses penyerapan anggaran, dan berdampak pada mekanisme pembayaran (pencairan anggaran).

Penelitian ini sejalan dengan Gagola et al., (2017) hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan t hitung $2,048 > t$ tabel $1,985$ sehingga pengadaan barang jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Menunjukkan jika proses pengadaan barang jasa baik maka penyerapan anggaran akan semakin baik. Menurut Rahmawati & Ishak, (2020) hasil pengujian secara parsial dengan uji t menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Handayani, (2017) menyatakan pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dimana nilai signifikannya sebesar $0,471 >$ dari $0,05$.

4.5.4 Pengaruh Komitmen Manajemen terhadap Serapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah

Pada variabel komitmen manajemen dari hasil uji parsial menunjukkan bahwa nilai signifikan yaitu $0,280$ dimana $>$ dari $0,05$ hal ini menunjukkan bahwa variabel komitmen manajemen tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran, maka H_4 dinyatakan ditolak. Hal ini tidak sejalan dalam penelitian Yanuariza et al., (2019), Gagola et al., (2017) dan Oktaliza et al., (2020) yang menyatakan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap serapan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik komitmen manajemen, maka akan semakin

baik pula tingkat penyerapan anggarannya. Begitu pula sebaliknya, jika pihak manajemen tidak memiliki komitmen yang baik dan tidak memberikan dukungan secara nyata kepada para pegawainya, maka tingkat penyerapan anggarannya akan rendah. Belum maksimal penyerapan anggaran pada beberapa OPD disebabkan karena belum mampu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun perencanaan anggaran yang kurang tepat. Menurut Mardiasmo (2009) bahwa penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakannya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang/jasa dan komitmen manajemen terhadap serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (studi pada Pemerintah Kota Palopo), maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Perencanaan anggaran dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka secara parsial perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah, sehingga hipotesis pertama dinyatakan .
- b. Pelaksanaan anggaran dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka secara parsial pelaksanaan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah, sehingga hipotesis kedua dinyatakan diterima.
- c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai t hitung sebesar 1,994 dan t tabel sebesar 1,672, maka secara parsial pengadaan barang/jasa berpengaruh secara signifikan terhadap serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah, dimana nilai t hitung lebih besar dari t tabel itu sendiri sehingga hipotesis ketiga dinyatakan diterima.
- d. komitmen manajemen memiliki nilai signifikan sebesar 0,280 dimana lebih besar

dari 0,05. Dengan nilai t hitung sebesar -1,091 dan nilai t tabel sebesar 1,672 dimana nilai t hitung lebih kecil dari t tabel, maka secara parsial komitmen manajemen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah, sehingga hipotesis keempat dinyatakan ditolak.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian diatas maka penulis memberikan saran antara lain:

- a. Pemerintah daerah Kota Palopo dalam upaya untuk meningkatkan penyerapan anggaran diharapkan dapat memberikan perhatian yang serius terhadap permasalahan penyerapan anggaran, dengan cara terus memperbaiki proses perencanaan anggaran, mempercepat proses pelaksanaan anggaran, melakukan proses pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meningkatkan komitmen manajemen dengan cara mendukung pelatihan/bimbingan teknis bagi para pegawai.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan agar penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi penelitian selanjutnya yang memiliki topik dan tema yang sama. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan melaksanakan penelitian dengan responden yang lebih luas agar penelitian dapat digunakan secara universal. Serta diharapkan menambah variabel penelitian, agar dapat diketahui adanya variabel lain yang mempengaruhi Serapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton, F. X. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen.
- Bastian Indra. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Suatu Pengantar. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- BPKP. (2011). *Menyoal Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta: Paris Review.
- Elim, M. A., Ndaparoka, D. S., & Tomasowa, T. E. D. (2018). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Audit*, 3(2), 46–56. <http://jurnal.pnk.ac.id/index.php/jaka/article/view/310/196>
- Gagola, L., Sondakh, J., & Warongan, J. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 8(1), 108–117. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15330>
- Ghozali. (2009). Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program SPSS (IV). UNDIP.
- Handayani, cut wuri. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Skpd Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2015 Dengan Silpa Sebagai Variabel Moderating. Simposium Nasional AKuntansi XX, September, 1–19.
- Jumriani, J. (2018). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Serapan Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare. *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(3), 11. <https://doi.org/10.31850/economos.v1i3.563>
- Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. (2018). Pentingnya Pelaksanaan Anggaran yang Tepat Waktu, Efektif dan Efesien. Bpsdm.Pu.Go.Id. <https://bpsdm.pu.go.id/bacaberita-pentingnya-pelaksanaan-anggaran-yang-tepat-waktu-efektif-dan-efesien>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Menkumham Yasonna H. Laoly. (2019). *PP 12 TAHUN 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah*. Jogloabang.Com. <https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-12->

2019-pengelolaan-keuangan-daerah

- Menteri Keuangan Sri Mulyani. (2020). Sri Mulyani Soroti Lambatnya Serapan Anggaran Pemerintah Daerah. Money.Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2020/12/01/190000526/sri-mulyani-soroti-lambatnya-serapan-anggaran-pemerintah-daerah->
- Mulyono, P. E. (2016). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik.4, 32–42.
- Oktaliza, Y., Ahyaruddin, M., & Putri, A. M. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. 1(April).
- Oktavianti, L. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Dan Ketersediaan Infrastruktur Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Di Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Rahmawati, R. S., & Ishak, J. F. (2020). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 180–189.
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran , Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.10(1), 134–148.
- Rifai, A., Inapty, B. A., & Pancawati M., R. S. (2016). Analisis Faktor–Faktor Yang Memengaruhi Keterlambatan Daya Serap Anggaran (Studi Empiris Pada SKPD Pemprov NTB). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1–10. <https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i01.p01>
- Salwah, A. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*,09(November 2019), 164–182.
- Yanuariza, Hasan, A., & M.Rasuli. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran , Pencatatan Administrasi , Sumberdaya Manusia , Komitmen Organisasi dan

Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran PNBK Kegiatan Pengamanan Objek Vital pada Satker Jajaran Polda Riau. *Ekonomi*, 27(4), 409–423.